

PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI

2019

PERBUPKAB MAMUJU NO. 128, BD 2019/NO.812, 11 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI

ABSTRAK : • untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, perlu percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Kabupaten Mamuju, kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Mamuju sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia, kejadian stunting disebabkan Oleh faktor yang bersifat multidimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 Hari pertama Kehidupan (HPKI) sehingga masyarakat sangat membutuhkan informasi untuk menjaga status kesehatan dan gizinya berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan dan penanganan Stunting Terintegrasi.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 26 Thn 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Thn 2011, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2004, PP No. 33 Tahun 2012, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 42 Tahun 2013, Perpres No. 83 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014, Perda Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2016, Perda Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016, Perbup No. 23 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Percepatan Pencegahan dan penanganan Stunting Terintegrasi, yang isinya memuat:

a. Ketentuan Umum, b. Asas Maksud dan Tujuan c. Pilar Pencegahan Stunting, d. Ruang Lingkup, e. Pendekatan f. Edukasi, Pelatihan dan Penyuluhan, g. Penelitian dan Pengembangan, h. Pelimpahan Wewenang dan Tanggungjawab, i. Sasaran Wilayah Pencegahan Stunting, j. Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat, k. Pencatatan dan Pelaporan, l. Penghargaan, m. Pendanaan, n. Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan dan penanganan Stunting Terintegrasi

CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 31 Desember 2019.